

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



=====

BPK RI Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011

Manado, Senin (19 Juni 2012) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Daerah Kota Bitung, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa (19/6). Penyampaian tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Utara BPK RI, Rochmadi Saptogiri, S.E., M.M., Ak. Kepada Ketua DPRD, dan dihadiri oleh Kepala Daerah, serta para Pejabat di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan ini merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung TA 2011 dari tanggal 09 April s.d 18 Mei 2012 yang lalu. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK RI mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan oleh Pemerintah atau entitas yang diperiksa, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung TA 2011, secara keseluruhan mengungkapkan sebanyak 7 temuan yang mencakup nilai sebesar Rp2.436.226.350,00, yakni sebanyak 4 temuan senilai Rp879.600.000,00 yang merupakan kelemahan dalam disain dan penerapan sistem pengendalian intern, dan sebanyak 3 temuan senilai Rp1.556.626.350,00 yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dampak yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut diantaranya adalah :

1. Timbulnya indikasi kerugian daerah yang terjadi pada sebanyak satu temuan senilai Rp531.720.000;
2. Adanya ketidakhematan dan potensi ketidakhematan serta inefisiensi yang terjadi pada sebanyak tiga temuan senilai Rp1.024.906.350,00;
3. Adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan uang dan barang milik daerah yang terjadi pada sebanyak satu temuan senilai Rp593.100.000,00;
4. Kesalahan peruntukan belanja dan Penyajian nilai aset tetap yang mengakibatkan salah saji pada Laporan Keuangan di dua temuan senilai Rp2.337.895.000,00

Dari uraian hasil pemeriksaan diatas, BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat atau opini.

Beberapa temuan yang menjadi dasar pertimbangan kami dalam menetapkan opini dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah kami serahkan, a.l sebagai berikut:

1. Sebagian realisasi belanja sosial tahun 2011 di antaranya tidak sesuai dengan definisinya dan merupakan realisasi untuk belanja hibah kepada instansi vertikal, serta seharusnya dianggarkan pada SKPD ;

2. Penilaian atas kelompok Aset Tetap pada Bulan Januari 2012 atas aset-aset pada tanggal Neraca per 31 Desember 2011 yang mengakibatkan adanya perbedaan nilai (kenaikan & penurunan) yang seharusnya telah diakomodir pada Neraca per 31 Desember 2011

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, maka opini yang kami berikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2011, adalah **“opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas (unqualified opinion)”**.

BPK Perwakilan Sulut berharap agar masing-masing Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya dapat terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah.

Terlepas dari hasil pemeriksaan sebagaimana kami sebut diatas, perlu juga kami ingatkan menyangkut LHP-LHP sebelumnya, yang menurut hasil pemantauan kami, belum sepenuhnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Bitung, yakni dari 195 temuan pemeriksaan yang terdiri dari 364 rekomendasi seluruhnya senilai Rp20.980.441.789,33, tingkat penyelesaiannya s.d saat pemeriksaan, adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan telah sesuai saran, sebanyak 207 saran atau 56,87% dengan nilai sebesar Rp12.963.227.085,64 atau 61,79%
2. Tanggapan belum sepenuhnya sesuai saran sebanyak 56 saran atau 15,38% dengan nilai sebesar Rp7.236.542.746,26 atau 34,49%
3. Belum ditindak lanjuti sebanyak 101 saran atau 27,75% dengan nilai sebesar Rp780.671.957,43 atau 3,72%.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara